

Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia

Shella Ananda Putri¹ Risky Dwi Ananda² Munajatun Nasih³ Dirham Nazwa⁴ Puteri Atikah⁵

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: putrishellaananda@gmail.com¹ riskydwiananda16@gmail.com² munajatunnasih478@gmail.com³ muhammaddirham843@gmail.com⁴ puteriatikah@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia sangat luar biasa. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mempertahankan sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama. Konsep moderasi beragam juga penting. Tujuan moderasi ini adalah untuk mencegah sikap ekstrem, kekerasan, dan konflik atas nama agama. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), memberikan kontribusi besar dalam mendukung nilai-nilai moderasi ini. Muhammadiyah fokus pada pendekatan pendidikan, sosial, dan dakwah kontemporer, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan tradisi dan pendekatan budaya untuk menyampaikan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan politik, keduanya juga aktif mencegah radikalisme dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Artikel ini menjelaskan bagaimana Muhammadiyah dan NU benar-benar membantu memperkuat moderasi beragama untuk membuat masyarakat Indonesia rukun dan harmonis.

Kata Kunci: Moderasi, NU, Muhammadiyah

Abstract

The diversity of cultures, religions, and ethnicities in Indonesia is extraordinary. In a situation like this, it is very important to maintain an attitude of mutual respect and tolerance between religious communities. The concept of diverse moderation is also important. The purpose of this moderation is to prevent extreme attitudes, violence, and conflict in the name of religion. The two largest Islamic organizations in Indonesia, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), have made major contributions in supporting these moderate values. Muhammadiyah focuses on contemporary educational, social, and da'wah approaches, while Nahdlatul Ulama uses traditions and cultural approaches to convey peaceful and tolerant Islamic values. Through various religious, educational, social, and political activities, both are also active in preventing radicalism and maintaining the integrity and unity of the nation. This article explains how Muhammadiyah and NU really help strengthen religious moderation to make Indonesian society harmonious and harmonious.

Keywords: Moderation, NU, Muhammadiyah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) dipengaruhi oleh perubahan pemikiran Islam di awal abad ke-20. Gagasan untuk kembali kepada ajaran Islam yang dianggap “asli” tanpa terikat pada mazhab tertentu mendorong para kiai pesantren untuk membentuk organisasi yang mampu menampung inovasi religius sembari tetap menghormati tradisi ilmu dari para ulama sebelumnya. K. H. Hasyim Asy’ari merumuskan Qanun Asasi dan I’tikad Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai dasar ideologi NU, yang kemudian dituangkan dalam khittah NU sebagai pedoman bagi anggota NU. Di sisi lain, Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Berdasarkan pengalamannya yang berupa perjalanan intelektual

dan spiritual, K. H. Dahlan awalnya berdakwah di lingkungannya melalui pengajian dan keterlibatan dalam organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Ia secara bertahap menyebarkan ide-ide pembaruannya, hingga akhirnya mendirikan Muhammadiyah sebagai tempat untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang lebih modern. NU dan Muhammadiyah, yang muncul di era pergerakan nasional Indonesia, memberikan sumbangsih baik melalui struktur organisasinya maupun tokoh-tokohnya, dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Kedua organisasi ini mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam hal pembaruan Islam di Indonesia, tetapi keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan keagamaan. Keanekaragaman ini merupakan aset sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi pendekatan yang sangat penting, menekankan pada keseimbangan, toleransi, serta penolakan terhadap semua bentuk ekstremisme dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Konsep ini sangat relevan dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa, terutama dalam menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan adil. Moderasi beragama bukan hanya sekadar diskusi, melainkan juga telah menjadi bagian dari rencana budaya nasional untuk merawat nilai-nilai keberagaman dan memperkuat semangat persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui berbagai cara, baik dalam pendidikan, dakwah, maupun kegiatan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang pemahaman dan penerapan konsep moderasi beragama dalam konteks Islam dan kebangsaan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas kontribusi Muhammadiyah dan NU dalam memperkuat nilai-nilai moderasi, serta peran penting keduanya dalam menanggulangi potensi radikalisme dan intoleransi keagamaan yang semakin muncul di era globalisasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan, bersama dengan metode studi pustaka (library Research). Metode ini dipilih untuk menyelidiki fenomena moderasi beragama di Indonesia dengan melihat bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berperan dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku dan artikel jurnal. Untuk memahami peran Muhammadiyah dan NU dalam mempertahankan dan memperkuat nilai moderasi umat di tengah ancaman radikalisme dan globalisasi, sumber-sumber tersebut dijelaskan secara menyeluruh. Untuk menggambarkan bagaimana kedua organisasi menerapkan praktik moderasi beragama, analisis dilakukan dengan meninjau literatur tersebut. Penulis juga menekankan cara Muhammadiyah dan NU menangani dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Proses interpretasi data dilakukan secara objektif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan utuh tentang tema yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Keislaman dan Kebangsaan di Indonesia

Moderasi beragama di Indonesia adalah upaya penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman yang ada. Sebagai negara yang memiliki banyak agama dan kepercayaan, Indonesia terus berusaha menata kehidupan keagamaan agar tetap harmonis. Sejak kemerdekaan, bangsa ini menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tapi tetap satu”. Namun, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, menjaga sikap moderat dalam beragama menjadi tantangan yang semakin rumit (Muliani M. Anzaikhan, Fitri Idani). Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya

akan budaya dan agama. Prinsip hidup berdampingan secara damai sangat penting, dan di sinilah moderasi beragama berperan besar. Moderasi beragama berarti mengedepankan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menolak kekerasan atas nama agama, serta menerima kekayaan budaya yang ada di masyarakat. Secara sederhana, moderasi adalah sikap menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan dalam berpikir maupun bertindak. Dalam hal agama, ini berarti memahami dan menjalankan ajaran dengan cara yang bijak dan tidak ekstrem. Sikap ini menghindarkan kita dari radikalisme dan fanatisme yang dapat memecah belah masyarakat. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *al-wasathiyah*, yaitu jalan tengah—tidak berlebihan dan tidak pula terlalu longgar. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajak umatnya untuk bersikap adil, seimbang, dan tidak memaksakan keyakinan.

Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang yang mendorong kita untuk memahami dan menjalani ajaran agama dengan sikap terbuka, adil, dan menghargai perbedaan. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian dan menghindari konflik antarumat beragama. Selain itu, moderasi ini juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kebhinekaan dan budaya bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara agama, kehidupan sehari-hari masyarakatnya tak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara ajaran agama dan kearifan lokal. Salah satu tujuan besar dari moderasi beragama adalah mengembalikan esensi ajaran agama sebagai sumber perdamaian, keselamatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sikap moderat membantu kita menghindari konflik yang disebabkan oleh penafsiran agama yang berlebihan dan sempit. Dalam Islam sendiri, moderasi menekankan pentingnya nilai-nilai seperti pertengahan (*tawassuth*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah sosial dan keagamaan (Arafat, 2020). Dalam kehidupan berbangsa, moderasi beragama sangat penting untuk menjaga perdamaian dan memperkuat toleransi antarumat. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan keberagaman (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi bukan hanya bagian dari ajaran agama, tetapi juga strategi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan bersikap moderat, umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia bisa berkontribusi membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Yunus, 2021).

Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Membangun dan Memperkuat Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Keberadaan keduanya telah terbukti sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka telah menunjukkan kualitas sebagai salah satu kesatuan dalam usaha mencerdaskan bangsa. Dari segi kegiatan dakwah, baik Muhammadiyah maupun NU memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Salah satu kesamaan antara NU dan Muhammadiyah adalah keduanya mengacu pada sumber ajaran yang sama, yaitu *al-Qur'an* dan Hadis. Namun, terdapat kalanya muncul perbedaan dalam penafsiran, yang biasanya dipengaruhi oleh cara pandang individu, lingkungan, dan kebiasaan masing-masing. Muhammadiyah dan NU hadir sebagai organisasi yang bertekad menjadikan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Muhammadiyah menerapkan metode dakwah yang terstruktur dengan baik. Semua aspek diatur dengan rapi, selaras, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, Muhammadiyah juga membentuk organisasi yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Partisipasi Muhammadiyah dalam dunia politik Indonesia juga cukup signifikan, melahirkan banyak politisi ternama. Muhammadiyah bagaikan jarum jam yang terus bergerak memenuhi kebutuhan umat.

Sementara itu, NU selalu berusaha menjaga perasaan umat lewat dengan pendekatannya. NU hadir dengan menyelaraskan ajaran Islam bersama tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Nilai-nilai adat tidak diabaikan begitu saja, melainkan dikaji secara cermat dan dibahas kesesuaiannya dengan tuntunan Islam. Dakwah kultural menjadi bagian integral dari NU. Budaya tidak harus merusak nilai-nilai agama, dan jika sejalan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung kegiatan dakwah. Jika dipertimbangkan dengan matang, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Agama dan budaya dapat berjalan berdampingan, dan inilah yang ditekankan oleh NU. NU juga memiliki pengaruh dalam arena politik di Indonesia, dan pengaruhnya sangat diperhatikan oleh para politisi. Gus Dur, seorang mantan presiden Indonesia, berasal dari kalangan NU dan dikenal berani mengambil langkah-langkah kebijakan inovatif. Ketertarikan Gus Dur terhadap ilmu pengetahuan turut memengaruhi perjalanan kepemimpinannya. Ia sangat dicintai oleh para pendukungnya yang antusias menyokong kepemimpinan Gus Dur. Banyaknya massa yang mengikuti menjadi salah satu faktor kunci kesuksesannya. Kini, NU telah berubah menjadi bagian terdepan dalam pembinaan umat. Nur Alhidayatillah dan Sabiruddin, (2018). Sebagai suatu organisasi yang telah berdiri lebih dari seratus tahun, Muhammadiyah jelas memiliki andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan Muhammadiyah dan komitmennya terhadap pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi pejuang yang berpengetahuan, berbudi pekerti baik, serta mempunyai semangat yang kokoh dalam menghadapi penjajah Belanda dan Jepang. (Ricklefs M. C. , 2005)

Bukan hanya di pusat pemerintahan, para tokoh Muhammadiyah di daerah juga berjuang secara diam-diam melawan penjajah kolonial dengan menyebarkan bibit nasionalisme di masyarakat. Beberapa tindakan yang mereka lakukan antara lain adalah: Pertama, memotivasi semangat anti penjajahan. Kedua, mereka melakukan boikot terhadap usaha yang mengambil hasil panen masyarakat untuk diserahkan kepada Jepang sebagai bentuk pajak dari masyarakat (Amin Umar, 1982). Kegiatan sosial yang digagas oleh Muhammadiyah seperti mendirikan rumah sakit dan panti asuhan bagi anak-anak yang menjadi korban akibat perang, semuanya bertujuan untuk menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan, persaudaraan, serta rasa nasionalisme. (Ghani dan kawan-kawan, 1985). Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki peran penting dalam pembangunan banyak pesantren yang didirikan untuk mencerdaskan anak bangsa dan memperkuat keimanan kepada Allah SWT. NU banyak melahirkan kelompok-kelompok penggerak jihad yang bertujuan tulus untuk membela agama, bangsa, dan tanah air, seperti Hizbullah yang dipimpin oleh K. H. Zainul Arifin. Selanjutnya Sabilillah di bawah komando K. H. Masykur. Mereka siap berkorban demi melindungi bangsa dan agama mereka (Lukman Hakim dan kawan-kawan, 1991). Salah satu hal yang sangat mempengaruhi semangat juang para santri pada masa itu adalah seruan Resolusi Jihad yang disampaikan oleh K. H. Hasyim Asyari, yang menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai hukum berperang untuk menentang musuh yang telah memasuki wilayah.

Tantangan Yang dihadapi Organisasi NU dan Muhammadiyah dalam Upaya Memperkuat Moderasi Beragama di Tengah Dinamika Sosial, Politik dan Keagamaan di Indonesia

Islam adalah agama rahmat yang diturunkan untuk mengajarkan perilaku sopan santun. Namun demikian, citra Islam seringkali dirusak oleh adanya gerakan atau sekelompok yang mengaku Islam, tetapi kemudian menyimpang atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, namun kemudian berperilaku menyimpang atau tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang mana terdapat Kelompok-kelompok teroris yang mengatasnamakan agama secara langsung menunjukkan masalah ini. Dua organisasi Muslim terbesar di negara kita Indonesia, yang berusaha meringankan masalah ini, yang mana Organisasi tersebut yakni, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). (Zakiya, 2017). Wajah Islam di beberapa wilayah ini sangat dipengaruhi

oleh cara penganutannya, keadaan politik, dan ekspresi dan tindakan agama Muslim di sana. Misalnya, di wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, Islam dipopulerkan melalui media kebebasan, yang kadang-kadang melibatkan kekuatan militer, sehingga wajah Islam tampak keras dan kaku. Meskipun hal-hal yang terjadi tidak selalu berarti pemaksaan penduduk lokal untuk menjadi Muslim, tetapi tampaknya daerah-daerah ini lebih banyak mengalami "Arabisasi" yang kuat. Namun, penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui proses akulturasi antara Islam dan budaya setempat, yang menghasilkan kombinasi yang sempurna yang menampilkan Islam Nusantara yang ramah dan moderat, atau bisa disebut sebagai Islam yang paling tidak diarabisasi. (Azra, hal. 16). Munculnya Gerakan Paderi di Sumatera Barat pada awal abad ke-19 memang memiliki wajah Islam yang keras. Trio haji, Haji Piobang, Haji Sumanik, dan Haji Miskin, yang baru kembali dari tanah Haramayn, memimpin gerakan ini. (Steenbrink, 1984, hal. 36). Di Minang, mereka mengambil tindakan radikal untuk menghilangkan kebiasaan dan adat istiadat yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Contoh kebiasaan ini termasuk judi, sabung ayam, minum arak, pakaian yang tidak menutup aurat, dan berbagai kebiasaan lain yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adat, serta sistem matriarchat yang dianut oleh orang Minang. Gerakan Paderi ini hanya bertahan sesaat dan tidak sempat menyebar ke luar wilayah Minang. (Zakiya, 2017 hal. 81).

Dengan Munculnya Organisasi Muhammadiyah tepatpada tahun 1912, sempat menimbulkan sedikit kegaduhan di tengah kalanagn masyarakat Jawa, Tepatnya di Yogyakarta. Masyarakat Jawa yang sangat kental dengan budaya ini terusik dengan gerakan purifikasi yang dicanangkan gerakan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha banyak mempengaruhi pemikiran dan gerakannya. menegaskan bahwa maraknya praktik takhayul, bid'ah dan khurafat di tengah masyarakat Muslim Pada saat itu adalah salah satu jenis aktivitas yang bertentangan dengan Tauhid yang dapat merusak prinsip Islam dan bahkan memasukkan tindakan Syirik. Sebagai bagian dari gerakan Purifikasi, Ahmad Dahlan telah menciptakan agama baru karna telah membangun Muhammadiyah ini. (Zakiya, 2017 hal. 81). Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang signifikan di era digital dan disrupsi teknologi. NU, sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada bidang keagamaan tetapi juga sosial kemasyarakatan, harus menghadapi perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Era digital dan perkembangan teknologi telah membawa dampak yang besar pada cara dakwah dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Tantangan ini memunculkan beberapa permasalahan yang perlu diatasi agar dakwah NU tetap relevan dan efektif di tengah perubahan zaman.(Nurul, 2024. Hal. 46). Perubahan dalam cara komunikasi dan interaksi sosial juga menjadi salah satu tantangan utama bagi dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di era modern seperti saat ini. Teknologi digital membuat komunikasi menjadi lebih mudah, tetapi juga mengubah cara orang berinteraksi dan mendapatkan informasi. Untuk tetap terhubung dengan audiens yang terbiasa dengan teknologi, NU harus mengubah metode dakwah mereka. Selain itu, dai NU harus lebih teliti dalam memilih dan menyampaikan pesan dakwah karena arus informasi yang cepat dan luas di era modern. Penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan radikalisme atau ajaran yang salah. Oleh karena itu, dai NU harus meningkatkan literasi digital dan keahlian mereka dalam menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan dakwah yang benar dan positif.

Selain itu, dakwah NU menghadapi tantangan tambahan karena polarisasi dan fragmentasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh media sosial dan platform digital. Upaya dakwah untuk menjangkau audiens yang beragam dan memiliki perspektif yang berbeda dapat menjadi lebih sulit. Ada kebutuhan bagi dai-dai NU untuk memiliki kapasitas untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di dunia digital dan untuk mengembangkan pendekatan dakwah yang inklusif dan menyatukan. Di tengah disrupsi teknologi, dakwah NU

juga menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif untuk menyebarkan ajaran Islam. Perkembangan teknologi seperti AI, big data, dan media sosial memungkinkan dakwah dilakukan secara lebih luas dan efisien. Namun penggunaan teknologi ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian agar dakwah tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. (Nurul, 2024. Hal. 46) Menurut Haedar Nashir, dengan alam pikiran itu Muhammadiyah tidak bersetuju dan tidak memberi ruang bagi adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul I-Ahd Wa al-Syahadah. (Republika, 26 Agustus, 2019). Selain itu juga, konsep Negara Pancasila sebagai Darul I-Ahd Wa al-Syahadah ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan pedoman untuk pemikiran dan tindakan seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Muhammadiyah juga telah menjadikan Islam Berkemajuan dan aktualisasi Darul I-Ahd wa al-Syahadah dalam penyediaan kurikulum di institusi pendidikannya. Muhammadiyah juga terus berusaha mendorong pemerintah untuk menangkal teorisme dan radikalisme dengan metode moderasi daripada kekerasan dan keamanan.

Di Madura juga terdapat Kabupaten Pamekasan yang mana kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki kekayaan budaya dan juga nilai-nilai keislaman yang cukup mendalam. Di tengah-tengah dinamika masyarakat di Kabupaten Pamekasan, konsep keluarga yang mencerminkan nilai-nilai moderasi yang menjadi sebuah ideal yang diperjuangkan oleh organisasi besar yaitu Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dengan melalui program Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (NU). Internalisasi moderasi dalam keluarga bukan hanya sekadar konsep, akan tetapi sebuah perjalanan yang cukup panjang yang melibatkan elemen keluarga untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Soekmawati, 2019, p. 204). Determinasi nilai moderasi dalam keluarga di Madura menjadi fokus utama program ini. Yang mana menjelaskan Bagaimana keluarga-keluarga di Kabupaten Pamekasan ini mampu mengintegrasikan bagaimana nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan bagaimana program ini menjadi wahana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju ke arah yang lebih baik. (Anwar & Ramadhita, 2020, p. 130). Program Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Pamekasan yang Terletak Di Madura ini, telah berhasil memperkuat nilai-nilai moderasi dalam kehidupan keluarga. Meskipun masih terdapat kendala kultural dan resistensi, dampak positif program ini cukup signifikan dalam menciptakan harmoni keluarga dan masyarakat.

Integrasi nilai-nilai moderasi dengan tradisi lokal terbukti menjadi kunci keberhasilan program ini. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dari Upaya untuk memastikan bahwa warga nahdhiyyin yang ada di Palengaan dan Proppo telah mampu menciptakan kehidupan keluarga yang masalah, yang ditunjukkan melalui kehidupan yang harmonis (Mohsi, 2024). Di tengah berbagai konflik yang muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman keagamaan tentang keragaman di Indonesia, moderasi beragama semakin dipromosikan dan dikampanyekan oleh pemerintah-pemerintah belakangan ini. Selain itu juga, diduga bahwa lebih banyak politik identitas daripada agama dapat memicu berbagai masalah sosial. Karena itu, pemikiran atau sikap keberagaman harus diubah. Ini dapat dicapai dengan mengubah perspektif yang eksklusif menjadi perspektif yang lebih pluralis dan inklusif. Moderasi agama secara etimologi diambil dari kata wasathiyah islamiah, yang berarti seimbang, moderat, atau tidak condong ke arah kanan atau kiri dalam agama. Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi, moderasi beragama didefinisikan sebagai sebuah sikap yang berada di tengah-tengah di antara dua sikap yang mungkin saling berseberangan atau berlebihan, sehingga kedua sikap tersebut tidak mendominasi pandangan agama (Babun Suharto: 2019).

Kontribusi Muhammadiyah dan NU Dalam Meredam Potensi Radikalisme dan Intoleransi Keagamaan

Akibat perkembangan globalisasi dan demokrasi yang cepat, radikalisme mulai menyebar dengan cepat sebagai akibat dari kemudahan akses teknologi dan penyebaran informasi yang cepat. Dengan demikian, serangan ideologi dapat masuk dengan cepat ke dalam pemahaman masyarakat luas, mengancam stabilitas negara (Said, 2021). Perjuangan Nahdlatul Ulama untuk melindungi bangsa dan negara dari paham radikalisme telah diajarkan sejak awal oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Mereka bergantung pada proses pembentukan landasan konstitusional setelah kemerdekaan, di mana Pancasila dianggap sebagai jalan tengah untuk menjalankan roda kenegaraan mengingat kemajemukan bangsa dan negara Indonesia. Nahdlatul Ulama terus mempertahankan prinsip-prinsip ini hingga hari ini. Sebenarnya, meskipun radikalisme tidak selalu melahirkan terorisme, faktanya adalah bahwa pemikiran radikal pada akhirnya melahirkan terorisme. Namun, ada hubungan yang jelas bahwa pemikiran radikal selalu memicu tindakan selanjutnya, seperti teror dan tindakan sparatisme terhadap perlawanan. Pada akhirnya, organisasi atau kelompok radikal yang secara gerakan bermula dari pemikiran radikal tersebut (Abdullah, 2014). Jika dikaitkan dengan gerakan-gerakan kelompok ekstrim untuk suatu agama tertentu, radikalisme seringkali dilabelkan sebagai kelompok Islam. Meskipun konstruksi stigma ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak dapat dibenarkan. Secara sederhana, radikalisme dapat didefinisikan sebagai sikap yang mengarah pada tindakan yang memiliki salah satu dari empat jenis ini: Pertama, sikap intoleransi, yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, terutama jika berkaitan dengan keyakinan orang lain Kedua, sikap fanatik, yaitu sikap yang mengizinkan pendapat diri sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain yang tidak setuju dengannya Ketiga, sikap yang tidak setuju dengan keyakinan orang lain.

Nahdlatul Ulama menyadari bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak dapat diatur secara bersamaan karena kemajemukan yang terjadi di negara ini (Harahap, 2017). Selain itu, sikap Nahdlatul Ulama jelas terlihat dalam penghapusan tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta pada sidang PPKI. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya", dan jika tujuh kalimat ini tidak dihapus, akan terjadi konflik horizontal. Nahdlatul Ulama melakukan berbagai upaya untuk mencegah radikalisme ini, termasuk visi kebangsaan dan keagamaan. Organisasi ini memainkan peran penting dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, baik secara ketatanegaraan maupun kebijakan politik. Mereka juga aktif mempertahankan bagian penting dari negara (Mubit, 2016). Pertama, visi kebangsaan Nahdlatul Ulama aktif melindungi pemikiran bangsa dari berbagai jenis radikalisme. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama mendukung penghapusan tujuh kalimat dalam pembukaan UUD 1945, yang menurut mereka tidak sejalan dengan kemajemukan dan rekognisi keagamaan (Muzadi, 1999). Di tengah berbagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mengharuskan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi yang ada di Indonesia, Nahdlatul Ulama mendukung penuh upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Pancasila. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa Pancasila dan UUD 1945 telah memuat tentang arah ideologi negara.

Nahdlatul Ulama menangani munculnya radikalisme agama yang berujung pada terorisme dan konflik horizontal dengan membahas berbagai strategi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk memberantas radikalisme. Beberapa diantaranya adalah inklusivitas, pluralisme, penguatan toleransi, dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Nahdlatul Ulama juga mengingatkan bahwa jika radikalisme ini terus muncul dan memicu tindakan selanjutnya, hal ini dapat merupakan upaya kolonialisme dengan gaya baru yang berusaha

merusak tatanan kenegaraan dengan menggunakan isu-isu agama dan golongan lain yang selalu menjadi masalah sensitif bagi masyarakat (Sahrasad & Chaidar, 2017). Selain memiliki visi kebangsaan, Nahdlatul Ulama juga memiliki visi keagamaan untuk melindungi bangsa dan negara dari ideologi radikal. Keyakinan dan ajaran mereka menyatakan bahwa kebaikan dan keselamatan harus menjadi titah dalam hidup berbangsa dan bernegara (Anam, 1998). Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai rabmatan lil alamin, yang membawa kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya Nahdlatul Ulama untuk memerangi radikalisme adalah dengan meningkatkan dakwah dan pembelajaran secara menyeluruh melalui kelembagaan dan sayap organisasi mereka. Hal ini diperlukan karena Nahdlatul Ulama memerlukan pendidikan dan ajaran keagamaan yang sejuk dan jauh dari Takfiri (sikap mengkafir-kafirkan yang berbeda) untuk memberantas radikalisme (Farih, 2016). Program dakwah Nahdlatul Ulama termasuk mendirikan sekolah-sekolah dan Universitas Nahdlatul Ulama untuk digunakan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman yang sama. Upaya Kedua adalah memperkuat program pemberdayaan masyarakat seperti misi kemanusiaan, misi lingkungan hidup (taddabur alam), gotong royong, badan amal zakat, dan infaq untuk membantu sesama warga negara untuk kepentingan umum, tanpa mengutamakan kelompok tertentu. Kegiatan sosial sangat penting untuk meningkatkan persaudaraan dan solidaritas sesama bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama menggunakan kegiatan sosial ini sebagai cara untuk menghentikan radikalisme. Ketiga, Nahdlatul Ulama memiliki program untuk meningkatkan perekonomian umat, seperti zakat, infaq, sodakoh, dan membina usaha kecil dan menengah (UKM). Program ekonomi umat ini sangat penting bagi Nahdlatul Ulama karena mereka percaya bahwa perilaku dan pemikiran radikal muncul sebagai akibat dari masalah ekonomi. Muhammadiyah sering menggunakan diskusi atau studi internal untuk mendakwahkan radikalisme. Kegiatan penelitian tersebut hanya diikuti oleh pengurus dan anggota sebagai bahan diskusi untuk menghentikan gagasan tersebut semakin meluas dan untuk mendapatkan pengetahuan baru untuk menangkal gagasan tersebut. Dalam upaya memberikan pemahaman dan pemahaman kepada mitra dakwah dari berbagai sumber hadal yang bertentangan dengan keagamaan kepada jama'ah, kajian setiap bulan ini secara tidak langsung telah menerapkan strategi rasional. Dengan kata lain, dari penjelasan ini, teori Al-Bayanuni sudah sesuai dan digunakan dalam salah satu bentuknya, yaitu mengajak para jama'ah untuk mengambil pelajaran, berpiknik, dan belajar. Muhammadiyah menggunakan dakwah sosial sebagai strategi dakwah untuk memerangi radikalisme. Kegiatan dakwah sosial ini meliputi bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kegiatan dakwah ini juga membantu orang miskin dan anak-anak yatim, yang telah didoktrin tentang radikalisme. Di sekolah dasar, SMP, SMA, dan SMK, sasaran gerakan dakwah sosial adalah masyarakat miskin, anak yatim, dan di bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Dua lembaga Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sangat membantu menjaga persatuan bangsa melalui moderasi agama. Keduanya mengajarkan Islam yang damai, toleran, dan menentang kekerasan. Muhammadiyah lebih fokus pada pendidikan, dakwah kontemporer, dan kegiatan sosial, sedangkan Nahdlatul Ulama memadukan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal dan budaya. Organisasi kedua ini berfungsi sebagai benteng penting untuk mempertahankan nilai-nilai keberagaman di tengah melawan globalisasi dan peningkatan radikalisme. Mereka tidak hanya mengajarkan orang untuk bertoleransi, tetapi mereka juga aktif mencegah paham ekstrem yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Muhammadiyah dan NU telah membantu memperkuat sikap

moderat dalam kehidupan beragama dengan cara yang berbeda tetapi saling melengkapi. Mereka memainkan peran penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang rukun, damai, dan menghargai keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2014). Radikalisme Agama : Dekontrasi Ayat Kekerasan Dalam Al-Quran. *Jurnal kalam*, 8.
- Alhidayatillah. Nur dan Sabiruddin. (2018). Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah: Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Amin Umar. (1982). Peranan mahmud Marzuki Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Kampar.
- Anwar, K., & Ramadhita, R. (2020). Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 130.
- Arafat, Y. (2020). Wasathiyah Islam: Moderasi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Yogyakarta: Deepublish.
- Babun Suharto, Et. All. (2019). Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia (A. Arifin (Ed.); Pertama). Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 79-81.
- Dinar Bela Ayu Naj'ma and Syamsul Bakri, "Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan," *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 422-34.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24(2), 252-270.
- Ghani, R. A., & dkk. (1985). Cita dan Citra Muhammadiyah. Pustaka Panji Mas.
- Harahap, S. (2017). Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Siraja. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hidayat, N. (2024). Tantangan Dakwah NU di Era Digital dan Distribusi Teknologi. *Jurnal Komunikasi Islam*, 46.
- Hidayat, N. (2024). Tantangan Dakwah NU di Era Digital dan Distribusi Teknologi. *Jurnal Komunikasi Islam*, 46.
- Mahfudotullah, Yeby Ma'asan Mayrudin (2024). Peran Nahdlatul Ulama dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme dalam Bernegara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. 24(2).
- Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 79-81.
- Mubit, R. (2016). Peran agama dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. *Jurnal Episteme*, 11(1).
- Muliani M. Anzaikhan, Fitri Idani, "Moderasi Beragama Sebagai Pemersatu Bangsa Serta Perannya Dalam Perguruan Tinggi," *Abrahamic Religions* 3, no. 1 (2023): 17-34.
- Muzadi, A. H. (1999). Membangun NU pasca Gus dur. Grasindo.
- Nurwahyudi, A. A, Ahidul.(2020). Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Menangkal Radikalisme di Kabupaten Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Communication*. 3(2).
- Ricklefs M.C. (2005). Sejarah Indonesia Modern. Gajah.
- Sahasrad, H., & Chaidar, A. (2017). Fundamentalism, Radikalisme, Terorisme Prespektif atas Agama Masyarakat dan Negara (Achyannuddin (ed.)). Freedom foundation.
- Said, A. (2021). Peran NU dalam menangkal radikalisme. Nu Online.



Saputera, A. R. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo. *Jurnal Moderasi Beragama*, 42.

Taufiqul Hadi, "Syari'at Islam Dan Semangat Moderasi Beragama Di Aceh," In *Urgensi Pembelajaran Agama Dan Toleransi Beragama*, ed. dkk Adi Wijayanto (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2024), 17-23